

Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

OPD : Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator
<p>Program : Program Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Kegiatan : Penyelenggaraan Musrenbang RKPD</p> <p>Tujuan : Terselenggaranya Musrenbang RKPD</p>	<p>- Dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, mengamanatkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan menggunakan pendekatan top down, bottom up, teknokratik, politis, aspiratif.</p> <p>- Musrenbang salah satu instrumen untuk menjawab pendekatan bottom up dan aspiratif</p> <p>- Kondisi saat ini pada RKPD tahun 2017 dan 2018 porsi terkait dengan isu-isu gender antara lain: disabilitas, lansia, pemuda, anak, kepala rumah tangga miskin perempuan (janda), dll masih minim baik di BAB II, BAB IV dan BAB V.</p>	<p>Akses</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang tidak menjangkau semua komponen masyarakat - Jadwal pelaksanaan Musrenbang disesuaikan dengan jadwal kepala daerah - Informasi pelaksanaan Musrenbang minim <p>Partisipasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materi yang disajikan dan cara penyampaian materi belum komunikatif untuk seluruh komponen yang diundang. <p>Kontrol</p> <ul style="list-style-type: none"> - Musrenbang hanya sebatas memenuhi amanat dalam penyusunan dokumen perencanaan <p>Manfaat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Porsi pengalokasian anggaran lebih banyak ditentukan oleh pendekatan top down dan politik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelola kegiatan belum responsif gender - Minimnya pelaksanaan sosialisasi, informasi dan edukasi kepada komponen masyarakat terkait penyusunan perencanaan - Karena keterbatasan anggaran mengakibatkan waktu pelaksanaan kegiatan sangat terbatas dan tidak sebanding dengan substansi yang dibahas - Mindset perencana di Bappeda bahwa mengusulkan kegiatan yang baru diluar renstra tidak diperbolehkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak semua kelompok masyarakat memiliki alamat yang jelas untuk dihubungi - Pelaksanaan kegiatan Musrenbang lebih mengutamakan seremonial dari pada substansi pembahasan - Tingkat kehadiran pemangku kebijakan/kepala SKPD minim - Makin tingginya tingkat pengawasan pada penyusunan perencanaan - Masih minimnya informasi yang dimiliki masyarakat terkait dengan prioritas pembangunan dan kewenangan masing-masing pemerintah daerah 	<p>Terwujudnya perencanaan yang responsif gender</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Musrenbang dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah - Pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Dharmasraya - Implementasi sistem perencanaan - Bimbingan teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan - Penyusunan RKPD Tahun 2020 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan musrenbang tahun 2018 peserta yang hadir 200 orang. - Komposisi jenis kelamin 139 laki-laki dan 61 perempuan. - Komposisi elemen yang hadir pemerintah 145, swasta 6, masyarakat 49 (ormas dan LSM) - Tingkat kehadiran disabilitas pada pelaksanaan musrenbang tahun 2018 tidak ada. 	<p>Kegiatan 1: Penyelenggaraan Musrenbang RI Input; Rp 241.457.000</p> <p>Output: Terlaksananya SKPD dan RKPD Tahun 2020</p> <p>Outcome; Terakomodirnya usulan masyarakat/kecamatan dalam ke dalam RKPD 2020</p>

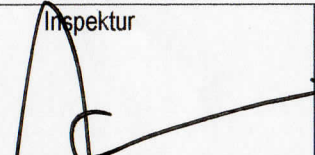
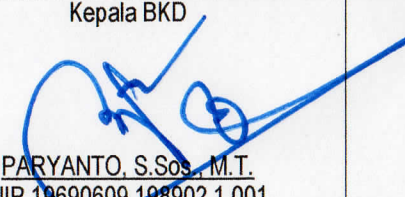
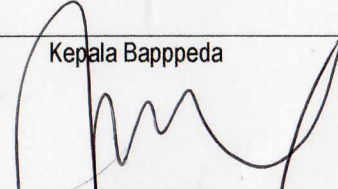
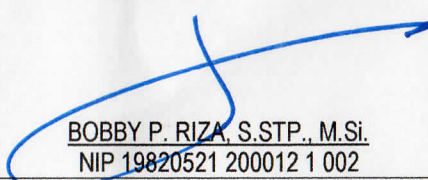
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
				<ul style="list-style-type: none"> - Musrenbang belum dianggap sebagai sesuatu hal yang penting untuk didukung oleh penganggaran yang maksimal - Domain politik dalam penyusunan penganggaran lebih dominan 				

KEPALA BAPPPEDA



Drs. ANDY SUMANTO, CFA
NIP 19681220 199009 1 001

Tim Verifikasi:

<p>Inspektur</p>  <p><u>KANDAM, S.Sos</u> NIP 19670607 199103 1 004</p>	<p>Kepala BKD</p>  <p><u>PARYANTO, S.Sos., M.T.</u> NIP 19690609 198902 1 001</p>	<p>Kepala Bappeda</p>  <p><u>Drs. ANDY SUMANTO, CFA</u> NIP 19681220 199009 1 001</p>	<p>Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB</p>  <p><u>BOBBY P. RIZA, S.STP., M.Si.</u> NIP 19820521 200012 1 002</p>
---	--	---	---